

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Relasi Islam dan demokrasi sebagai sebuah diskursus selalu menjadi fokus pembicaraan dan topik yang menarik ketika mengkaji Islam dan hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini mengingat saat ini demokrasi diadopsi oleh sebagian besar negara-negara muslim bahkan demokrasi dipandang sebagai sistem politik yang terbaik dan menjadi solusi dalam menata dan menjalankan kehidupan kenegaraan. Sementara dalam pandangan para sarjana Barat bahwa prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip demokrasi tidak akan bisa berjalan secara berdampingan dan harmonis di negara-negara muslim, karena Islam dan demokrasi tidak kompatibel.

Pandangan bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa berjalan secara berdampingan dan harmonis sebenarnya telah dibantah oleh para sarjana muslim sendiri seperti tesis yang dikemukakan oleh Saiful Mujani (Mujani, 2007) Dalam hasil riset tersebut Saiful Mujani membantah terhadap tesis tiga sarjana Barat (Samuel Huntington, Bernard Lewis dan Ellie Kedourie) yang memandang bahwa Islam dan demokrasi bertentangan dan karenanya demokrasi sulit menjadi karakteristik masyarakat muslim.

Sebelumnya ada riset Masykuri Abdillah (Abdillah, 1999) yang mengkaji relasi Islam dan demokrasi dan secara spesifik mengkaji respon intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi. Menurut Masykuri Abdillah bahwa respon intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi berbeda bila dibandingkan dengan intelektual muslim luar Indonesia. Kalau intelektual muslim luar Indonesia masih memperdebatkan sistem demokrasi maka semua intelektual muslim Indonesia (termasuk

kalangan intelektual Muhammadiyah) menerima sistem ini dan bahkan mendukungnya sebagai sistem yang harus dipraktikkan dalam masyarakat Islam. Penerimaan itu baik dari segi doktriner (konsep, norma) maupun historis.

Kompatibilitas antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi juga dikaji secara lebih spesifik oleh Artani Hasbi (Hasbi, 2001) dalam bentuk hubungan antara musyawarah dan demokrasi. Menurut Artani Hasbi bahwa dalam praktik kenegaraan Indonesia antara *ahl al-hall wa al-'aqd* dan majelis permusyawaratan rakyat / dewan perwakilan rakyat (MPR/DPR) mempunyai banyak kesamaan. Namun dari segi sumber hukum yang mendasari segala tugas, fungsi dan kewenangan serta bentuk kelembagaan antara keduanya terdapat perbedaan.

Ketiga tesis di atas, menurut hemat penulis, sudah cukup menggambarkan bahwa di negara-negara muslim khususnya di Indonesia pasca Orde baru atau di Era Reformasi ini untuk menyatakan bahwa Islam dan demokrasi tidak kompatibel (tidak cocok, tidak sesuai) telah terbantahkan. Bahkan kompatibilitas antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi telah dibuktikan oleh ketiga tesis tersebut. Namun diakui bahwa masih ada perbedaan antara demokrasi yang dipraktikkan di negara-negara Barat dengan demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia.

Secara normatif dan substantif sebenarnya antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia menurut kalangan intelektual muslim sudah tidak menjadi persoalan. Namun dalam prosedur demokrasi seperti rekrutmen politik dan sistem pemilihan umum masih sering diperdebatkan. Terbukanya kran demokrasi untuk menyatakan pendapat terkadang menjadi ajang kebebasan yang berlebihan sehingga menjadi kebablasan. Di sisi lain memang dibutuhkan peran dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sebagai *civil society* (masyarakat madani) yang

bergerak di luar jalur politik praktis untuk menyatakan pendapatnya mengenai persoalan-persoalan politik kenegaraan.

Dalam konteks ini Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam telah turut berperan menentukan arah politik kehidupan kenegaraan di Indonesia. Muhammadiyah sejak awal lahirnya (1912) memang bukan organisasi politik akan tetapi tidak buta politik dan tidak lepas dari suasana dan dinamika kehidupan politik bangsa. Keterlibatan kader-kader Muhammadiyah dalam pergerakan kemerdekaan hingga upaya mengisi kemerdekaan dengan pembangunan telah membuktikan kesetiaan warga Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Karena proses historis seperti itu maka eksistensi Muhammadiyah oleh para ilmuwan sosial kerap dipandang sebagai salah satu representasi keberadaan kaum muslim di Indonesia dan “Islam” itu sendiri. Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi, Muhammadiyah dipandang sebagai kekuatan sipil Islam yang turut memengaruhi proses demokratisasi di negara ini. Persyarikatan Muhammadiyah dianggap telah memainkan peran penting dalam perpolitikan Indonesia (Mujani, 2007)

Oleh karena itu untuk menggambarkan hubungan Islam dan demokrasi dalam praktik kenegaraan Indonesia bisa dilihat bagaimana para kader Muhammadiyah memberikan respon terhadap demokrasi baik secara substantif maupun prosedural. Secara substantif, hubungan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi dipandang tidak ada persoalan meski ada sedikit perbedaan. Namun jika dilihat dari sisi prosedur demokrasi masih banyak persoalan antara lain masalah siapa berwenang mengatur siapa, siapa berwenang mengawasi siapa dan seterusnya.

Untuk itu keterlibatan para kader Muhammadiyah sangat penting untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa

antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dapat berjalan seiring dan berdampingan secara harmonis. Kompatibilitas antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia ditunjukkan dengan tampilnya para kader Muhammadiyah dalam rekrutmen politik secara sukarela di level nasional maupun di daerah-daerah di Indonesia. Kompatibilitas antara Islam dan demokrasi juga ditunjukkan oleh respon kader-kader Muhammadiyah terhadap demokrasi meskipun mereka tidak terjun di dunia politik praktis.

Dalam konteks lokal Kalimantan Tengah bergulirnya Era Reformasi telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial budaya dan politik di daerah ini. Berkaitan dengan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil Islam di daerah ini, berdasarkan pengamatan sementara penulis ada beberapa fenomena menarik yang muncul ke permukaan, yakni *pertama*, makin menguatnya partisipasi para kader Muhammadiyah setempat dalam proses demokratisasi seperti keterlibatan mereka dalam mendirikan dan mengelola partai politik, dan keterlibatan dalam pemilihan umum legislatif dan eksekutif (1999, 2004, 2009, 2010, 2013, 2014 dan 2015) *Kedua*, meningkatnya kegairahan kalangan warga Muhammadiyah setempat dalam mewacanakan relasi Islam dan demokrasi. *Ketiga*, meningkatnya partisipasi kalangan warga Muhammadiyah setempat dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Sebagaimana umumnya daerah-daerah lain di Indonesia, masyarakat Kalimantan Tengah adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai unsur etnis, agama, budaya, dan taraf ekonomi. Selama rezim Orde Baru masyarakat daerah ini juga mengalami keterpasungan dalam jaring-jaring otoritarianisme. Hak-hak politik masyarakat sangat dibatasi untuk dapat mengakses

kekuasaan. Perlakuan seperti ini adalah lumrah saat itu karena kebijakan politik Orde Baru tidak memberikan peluang bagi rotasi kekuasaan eksekutif secara terbuka. Situasi ini berlaku dalam proses politik baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. (Gaffar, 2006) Dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya Era Reformasi telah membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis. Rekrutmen politik lokal tidak lagi dilakukan secara tertutup, tetapi terbuka bagi segenap komponen masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif sejalan dengan semangat demokrasi. Seperti pemilihan umum kepala daerah (pemilihan gubernur dan bupati/walikota) dan pemilihan anggota legislatif.

Kondisi seperti ini tentunya tidak disia-siakan oleh kader-kader terbaik Muhammadiyah di daerah ini untuk ikut terjun ke kancah pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg). Fenomena ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan suasana ketika rezim Orde Baru berkuasa. Bergulirnya Era Reformasi dan keterbukaan juga memberi peluang yang lebih luas bagi kalangan warga Muhammadiyah di daerah ini untuk mewacanakan kembali (*rethinking*) tentang relasi Islam dan demokrasi, khususnya hubungan Islam dan negara dalam sistem politik Indonesia pasca rezim Orde Baru.

Sementara itu partisipasi kalangan warga Muhammadiyah di daerah ini dalam menciptakan toleransi dan suasana damai dalam kehidupan sosial, baik internal maupun eksternal, patut mendapat pujian dan apresiasi. Kiprah kalangan warga Muhammadiyah tidak saja tampak pada saat konflik sosial terjadi dan memuncak akan tetapi secara terus menerus mereka terlibat dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Seperti pada saat tragedi Sampit (2001) kader-kader Muhammadiyah bersama komponen masyarakat yang lain bahu-membahu untuk meredam dan mencari jalan penyelesaian

terbaik. Kiprah lainnya juga tampak pada even-even keagamaan. Pengalaman ini tentunya tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya saja tetapi pada sikap dan komitmen untuk mengedepankan toleransi dan semangat beragama yang inklusif sejalan dengan semangat demokrasi.

Beberapa fenomena di atas lebih lanjut memunculkan kekhawatiran atau kegelisahan akademik bagi penulis. *Pertama*, banyaknya kader Muhammadiyah yang terjun ke arena politik praktis, dapat memicu munculnya friksi-friksi di kalangan warga Muhammadiyah. Hal ini dapat melemahkan posisi Muhammadiyah sebagai kekuatan masyarakat sipil Islam dalam konfigurasi politik lokal. Pada dasarnya kekuatan masyarakat sipil dibangun untuk mengimbangi kekuatan negara supaya tidak terjadi dominasi (hegemoni) negara terhadap hak-hak sipil. Kekuatan hegemonik negara terhadap masyarakat sipil tentunya tidak dikehendaki karena tidak sejalan dengan prinsip dan semangat demokrasi. Hal ini dikhawatirkan juga menimbulkan pergeseran orientasi kejuangan para kader Muhammadiyah dari orientasi kultural kepada struktural (kekuasaan).

*Kedua*, dengan bergulirnya era reformasi dan keterbukaan untuk berekspresi, fundamentalisme agama cenderung meningkat. Hal ini dapat mendorong polarisasi masyarakat berdasarkan identitas agama. Para kader Muhammadiyah yang juga sebagai "elit agama" di tingkat lokal dikhawatirkan larut dan terseret ke dalam pertarungan ideologis yang tidak berkesudahan. Sementara persoalan sosial yang mendasar seperti problem kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan sejenisnya cenderung diabaikan, *Ketiga*, dengan bergulirnya era reformasi dan keterbukaan, juga lebih mendorong partisipasi politik warga Muhammadiyah dalam proses demokratisasi baik di level nasional maupun di tingkat lokal. Meningkatnya kegairahan warga Muhammadiyah dalam proses

politik dapat berdampak positif seperti menguatnya fungsi kontrol terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Namun tidak jarang menimbulkan dampak negatif. Seperti munculnya tarik menarik kepentingan antara kepentingan organisasi (*persyarikatan, jam'iyah*) di satu sisi dan kepentingan pribadi di sisi yang lain yang melibatkan emosi massa.

Respon kader-kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah menurut hemat penulis dapat dikategorikan menjadi dua ranah yaitu *pertama*, respon kader Muhammadiyah terhadap kehidupan dan perkembangan demokrasi serta peran-peran yang dimainkan dalam mengusung kehidupan demokrasi di daerah namun tidak terjun secara langsung di politik riil. Hal ini mengingat Muhammadiyah bukan organisasi politik. *Kedua*, gerakan politik kader Muhammadiyah dalam arti keterlibatan mereka sebagai calon dalam pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah yang mana mereka berhasil memenangkan pemilu tersebut.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa kader-kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah mampu membuat gerakan politik yang elegan dan cantik tanpa mempersoalkan hubungan Islam dan demokrasi itu sendiri secara substantif. Mereka adalah Achmad Diran yang terpilih sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dua periode (2005-2010 dan 2010-2015), terpilihnya Ade Supriyadi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dua periode (2009-2014 dan 2014-2019) dan terpilihnya Muhammad Riban Satia sebagai Walikota Palangka Raya dua periode (2008-2013 dan 2013-2018). Mereka bertiga merupakan figur kader Muhammadiyah di Kalimantan Tengah.

Fenomena tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam tentang relasi Islam dan demokrasi dalam bentuk bagaimana respon kader-kader Muhammadiyah Kalimantan

Tengah terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan bagaimana gerakan politik kader Muhammadiyah untuk memenangi pemilu di Era Reformasi di tingkat lokal. Beberapa pertimbangan memilih studi ini antara lain. *Pertama*, kajian tentang respon kader Muhammadiyah terhadap demokrasi dan keterlibatan kader tersebut di dunia politik praktis di Era Reformasi, menurut hemat penulis, selama ini masih dominan dan terpusat di Pulau Jawa. Hal ini, menimbulkan ketidakseimbangan data antara Jawa dan luar Jawa. Sementara riset di luar Jawa dalam konteks tersebut masih sangat langka dan kering. Bahkan di beberapa daerah tertentu tidak tersentuh sama sekali (Asyari, 2009). *Kedua*, kajian empiris kontemporer tentang politik Islam selalu mengandung dan mengundang “dilema” tersendiri. Hal itu terjadi karena “doktrin” Islam yang tidak monolitik melainkan multitafsir dalam memandang hal tersebut. Keterlibatan para kader Muhammadiyah sebagai “elit agama” dan “elit kultur” di level daerah sangat penting dalam “menafsirkan kembali” doktrin-doktrin keagamaan dalam konteks kehidupan sosial dan politik guna menjaga harmoni kehidupan masyarakat di daerah setempat.

*Ketiga*, sebagian ilmuwan Barat masih terjebak dalam paham antagonis ketika membicarakan relasi Islam dan demokrasi. Mereka masih memandang bahwa hubungan antara Islam dan demokrasi sebagai hubungan paradoksal. Karena itu mereka pesimistis bahwa demokrasi bisa berkembang di negara-negara muslim. Dalam pandangan mereka bahwa demokrasi tidak bisa menjadi karakteristik muslim dalam budaya politik modern. (Mujani, 2007, hal. 13) Mereka beranggapan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Klaim ini, menurut hemat penulis, tidak sepenuhnya menggambarkan realitas kaum muslim pada umumnya yang saat ini berjumlah sudah hampir seperempat penduduk dunia, khususnya kaum muslim yang ada di Indonesia.

Sebaliknya fakta menunjukkan bahwa kaum muslim di Indonesia, termasuk kalangan warga Muhammadiyah, menerima demokrasi dengan segala konsekuensinya. Menurut hemat penulis, kajian-kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan Barat mengenai relasi Islam dan demokrasi selama ini masih didominasi perspektif “kepentingan” politik global Barat terhadap dunia Islam dengan pandangan yang penuh prasangka (*prejudice*) dan bias (*stereotype*). Karena itu, perlu diuji kembali secara empiris mengenai kompatibilitas dan inkompatibilitas antara Islam dan demokrasi khususnya dalam perspektif kader-kader “lokal” Muhammadiyah Kalimantan Tengah.

*Ketiga*, sejak studi Islam, dan juga studi politik, semakin didominasi oleh dikotomi “radikal” versus “moderat” (Asyari, 2009), Muhammadiyah telah diletakkan dalam kategori Islam “moderat”, sebuah klaim yang masih terbuka untuk diperdebatkan kembali. Misalnya, dengan mempertanyakan kembali apa saja kriteria Islam “radikal” dan apa saja kriteria Islam “moderat”. Menurut hemat penulis, dalam konfigurasi gerakan Islam di Indonesia sekarang ini, makna ‘moderatisme’ Muhammadiyah boleh jadi telah bergeser karena perkembangan zaman dan perubahan sosial yang cepat. Fenomena perilaku para kader Muhammadiyah dalam merespon dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal dalam beberapa dasawarsa terakhir penting dipahami untuk menjelaskan perubahan makna tersebut.

*Keempat*, banyak studi yang telah dilakukan mengenai Muhammadiyah, akan tetapi generalisasi dari hasil kajian-kajian tersebut mengenai kehidupan sosial dan politik di negeri ini perlu dibahas lebih lanjut. Di samping itu, kajian tentang Muhammadiyah di Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan dinamika sosial politik pasca jatuhnya rezim Orde Baru, sepengetahuan penulis, belum pernah dilakukan. Selain hal-hal

tersebut di atas, ketiadaan data tentang “Islam” dan “konfigurasi gerakan Islam” di Kalimantan Tengah pada era reformasi ini, semakin mendorong penulis untuk melakukan studi ini guna mengisi kekosongan tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebuah pertanyaan besar sebagai fokus studi ini yakni bagaimana respon dan gerakan politik kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Era Reformasi.

Sebagai derivasi dari masalah pokok di atas dirumuskan sub pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dialektika Islam dan demokrasi dalam perspektif Muhammadiyah Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana respon kader-kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap demokrasi di Era Reformasi?
3. Bagaimana gerakan politik kader-kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah (Achmad Diran, Ade Supriyadi dan Muhammad Riban Satia) di Era Reformasi?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Studi ini sesungguhnya secara umum ingin mengungkapkan dan memahami pandangan dan perilaku politik kader-kader Muhammadiyah dalam dinamika politik Kalimantan Tengah di Era Reformasi khususnya keterlibatan kader-kader Muhammadiyah (Achmad Diran, Ade Supriyadi dan Muhammad Riban Satia) secara personal di kancah politik Kalimantan Tengah. Fokus tujuan studi ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Ingin mengetahui dan menjelaskan dialektika Islam dan demokrasi dalam perspektif Muhammadiyah Kalimantan Tengah.
- b. Ingin mengetahui dan menjelaskan respon kader-kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap demokrasi di Era Reformasi
- c. Ingin mengetahui dan menjelaskan gerakan politik kader-kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah (Achmad Diran, Ade Supriyadi dan Muhammad Riban Satia) di Era Reformasi.

### 1.3.2. Kegunaan

Hasil studi ini diharapkan memberi manfaat, *pertama*, memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan Studi Islam dan Ilmu Politik Islam khususnya mengenai relasi Islam dan demokrasi dan praktik-praktik demokrasi atau demokrasi prosedural yang diterapkan umat Islam di Kalimantan Tengah - khususnya oleh kader-kader Muhammadiyah di Kalimantan Tengah - dalam konteks sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, memberi informasi dan masukan bagi Persyarikatan Muhammadiyah Kalimantan Tengah dalam merumuskan kebijakan organisasi terutama yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan peran Muhammadiyah Kalimantan Tengah sebagai kekuatan masyarakat sipil Islam terbesar di daerah ini dalam membangun masyarakat yang demokratis. *Ketiga*, memberi informasi dan masukan bagi pimpinan Muhammadiyah dalam menentukan kebijakan tentang hubungan persyarikatan Muhammadiyah dengan para warganya dalam konteks pembangunan di bidang sosial politik dan implementasi demokrasi di tingkat lokal, dan *keempat*, menjadi data awal atau informasi pendahuluan bagi peminat yang akan meneliti lebih lanjut.

#### **1.4. Publikasi Karya Ilmiah**

- 1.4.1. Publikasi Artikel. Surya Sukti, Tulus Warsito, Zuly Qodir, Hasse Jubba dengan judul: Political Dynamics of Islamic Law in the Reform Era: A Study of the Response of Muhammadiyah Cadres in Central Kalimantan, Jurnal Samarah Vol.6, No.2, 2022. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167

Alamat link:

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/12415>

- 1.4.2. Publikasi Artikel. Surya Sukti, Tulus Warsito, Zuly Qodir, Hasse Jubba dengan judul: Keadilan Gender: Pendidikan, Kepemimpinan dan Hak Kewarisan Islam, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 18, No. 2, Desember 2022, p. 130-137. ISSN: 1829-8257; ISSN: 2540-8232.

Alamat link:

<https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/4166/1987>

#### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam disertasi ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, berisi uraian tentang 1.1. latar belakang masalah, 1.2. rumusan masalah, 1.3. tujuan dan kegunaan penelitian, 1.4. publikasi karya ilmiah, dan 1.5. sistematika pembahasan.

Bab 2 Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, berisi uraian tentang 2.1. riset terdahulu, dan 2.2. kerangka teoretik.

Bab 3 Metode Penelitian, berisi penjelasan tentang 3.1. jenis dan pendekatan penelitian, 3.2. data dan sumber data, 3.3. objek dan subjek penelitian, 3.4. teknik pengumpulan data, 3.5 pengabsahan data, 3.6. analisis data.

Bab 4 Dialektika Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Pemikiran Islam berisi kajian dan pembahasan mengenai 4.1. dialektika Islam dan demokrasi di era klasik, pertengahan dan era modern, 4.2. tipologi pemikiran Islam tentang demokrasi, 4.3. Islam dan demokrasi di Indonesia, 4.4. Islam, Muhammadiyah dan politik, dan 4.5. respon Muhammadiyah terhadap isu-isu aktual.

Bab 5 Perkembangan dan Dinamika Politik Kalimantan Tengah, berisi uraian mengenai 5.1. perjuangan mendirikan Provinsi Kalimantan Tengah, 5.2. geografi dan sosial budaya Kalimantan Tengah, dan 5.3. pemerintahan Kalimantan Tengah, serta 5.4. terbentuknya Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, 5.5. geografi dan sosial budaya, 5.6. pemerintahan Kota Palangka Raya dan 5.7. Suku Dayak dan Dakwah Islam di Kalimantan Tengah.

Bab 6 Awal Masuk dan Perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Tengah berisi kajian dan pembahasan tentang 6.1. Teori Masuknya Muhammadiyah di Kalimantan Tengah, 6.2. Awal Masuk dan Perkembangan Muhammadiyah di Daerah Aliran Sungai Kapuas, 6.3. Awal Masuk dan Perkembangan Muhammadiyah di Daerah Aliran Sungai Barito, dan 6.4. Awal Masuk dan Perkembangan Muhammadiyah di Daerah Aliran Sungai Mentaya dan Katingan, dan 6.5. Awal Masuk dan Perkembangan Muhammadiyah di Daerah Aliran Sungai Kahayan dan Seruyan.

Bab 7 Respon Kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap Demokrasi di Era Reformasi, berisi kajian dan pembahasan mengenai 7.1. respon kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap relasi Islam dan demokrasi, 7.2. respon kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap isu-isu aktual lainnya, dan 7.3. respon kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap rekrutmen politik di Era Reformasi.

Bab 8 Respon dan Gerakan Politik Kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Era Reformasi berisi kajian dan pembahasan tentang 8.1. respon dan gerakan politik Achmad Diran, 8.2. respon dan gerakan politik Ade Supriyadi, dan 8.3. respon dan gerakan politik Muhammad Riban Satia.

Bab 9 Analisis terhadap Respond an Gerakan Politik Kader Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Era Reformasi berisi analisis dan diskusi tentang 9.1. respon dan gerakan politik Achmad Diran, 9.2. respon dan gerakan politik Ade Supriyadi, dan 9.3. respond an gerakan politik Muhammad Riban Satia.

Bab 9 Penutup, berisi uraian mengenai 10.1. kesimpulan atau simplikasi dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 10.2. keterbatasan dan rekomendasi serta 10.3. implikasi teoritik dari temuan-temuan dalam studi ini.